

ILMU PENGETAHUAN DAN ETIKA: Pencarian Makna Dan Relevansi Dalam Narasi Qur'anik

Science And Ethics: The Search for Meaning and Relevance in the Qur'anic Narrative

العلوم والأخلاق:
البحث عن المعنى والصلة في السرد القرآني

Muhammad Adlan Nawawi
Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
adlannawawi@ptiq.ac.id

Abd. Muid N.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
balesaloe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan membutuhkan sandaran etis dalam wilayah praksis. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20 sebagai kelanjutan dari gairah revolusi kopernikan harus merujuk pada nilai (value) universal, bukan sekedar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sehingga pada gilirannya, ilmu pengetahuan akan memberi manfaat bagi kemanusiaan. Di sisi lain, landasan etis sesungguhnya sejak awal telah ditradisikan oleh al-Qur'an melalui pesan-pesan holistik-universal yang dikandungnya. Secara khusus, al-Qur'an menegaskan dirinya sebagai pedoman hidup, pemberi kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Hal itu menunjukkan bahwa narasi qur'anik adalah narasi petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai instrumen peradaban.

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan; Etika; Rasionalitas; al-Qur'an.

Abstract

This study concludes that science needs ethical backing in the area of praxis. The development of science in the 20th century as a continuation of the passion of the Copernican revolution must refer to universal values, not just for the sake of science itself. So that in turn, science will benefit humanity. On the other hand, the real ethical foundation has been in the tradition from the beginning by the Qur'an through the holistic-universal messages it contains. In particular, the Qur'an asserts itself as a guide to life, a giver of good news and a warning to mankind. This shows that the qur'anic narrative is a narrative of instructions on how to live a better life by making science an instrument of civilization.

Keywords: Science; Ethics; Rationality; Al-Qur'an.

الملخص

خلصت هذه الدراسة إلى أن العلم يحتاج إلى دعم أخلاقي في مجال التطبيق العملي. يجب أن يشير تطور العلم في القرن العشرين باعتباره استمرارًا لشغف الثورة الكوبرنيكية إلى القيم العالمية، وليس فقط من أجل العلم نفسه. وهذا بدوره سيفيد البشرية. من ناحية أخرى فإن الأساس الأخلاقي الحقيقي كان في تقليد القرآن منذ البداية من خلال الرسائل الشمولية الشاملة التي يحتويها. على وجه الخصوص يؤكد القرآن نفسه كدليل للحياة ومبشر للبشر وتحذير للبشرية. يوضح هذا أن السرد القرآني هو سرد لتعليمات حول كيفية عيش حياة أفضل من خلال جعل العلم أداة للحضارة.

الكلمات المفتاحية: علوم؛ أخلاق؛ عقلانية؛ القرآن.

Pendahuluan

Sulit dimungkiri, Masa Pencerahan (*The Enlightenment*) di Eropa pada abad ke-17 dan 18 membangkitkan kembali gairah dan keemasan Yunani Kuno di panggung sejarah dan peradaban kemanusiaan. Tradisi dan dogma yang seringkali dengan mudah dijadikan alat legitimasi untuk membungkam perbedaan dan kritisisme, mulai ditinggalkan. Kemajuan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial mengisi relung-relung keseharian, hingga menyisakan kemajuan yang begitu pesat. Pada abad ke-17, Rene Descartes yang mewakili praksis-revolusioner filsafat *ala* Perancis dan Isaac Newton yang merepresentasi corak empirisisme Inggris justru menjadikan ketiga “pemberontak” tersebut sebagai referensi. Bisa dipastikan, karakter pencarian kebenaran ilmu pengetahuan pada latar berikutnya menjadikan menurunkan kedigdayaan bumi (alam) pada manusia. Subjek individual kemanusiaan menjadi sumber perhatian sekaligus keabsahan atas segala justifikasi terkait nilai yang dimiliki oleh argumentasi. Tapi, pada perkembangan selanjutnya, abad ke-20 menampilkan realitas yang cukup mengundang polemik. Jika manusia sebagai sumber kebenaran atas pertanyaan tentang pengetahuan, lalu sejauhmana dampak peperangan akibat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang memusnahkan umat manusia, bisa dipahami?

Setelah sebelumnya alam sebagai *signs of God (âyat)*,¹ lalu direduksi menjadi sekedar kalkulasi matematis dalam alur pikir ilmiah yang verifikatif, lalu di mana letak kemukjizatan dan hikmah ketuhanan yang sejatinya mewarnai kehidupan umat manusia dan menciptakan tatanan kehidupan yang dipenuhi nilai dan moralitas? Semakin memprihatinkan saat ketidakmampuan memahami posisi ilmu pengetahuan menyebabkan banyak kalangan yang enggan mendekatinya dan menyebutnya sebagai ilmu atau pengetahuan menyimpang dan tidak layak untuk digeluti.

Pembahasan dalam tulisan ini hendak membincang tentang posisi ilmu pengetahuan dan relasinya dengan etika universal yang dijadikan sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan yang terlanjur tergerus oleh kesalahpahaman tentang entitas ilmu pengetahuan sendiri. Menjadikan etika sebagai referensi solutif adalah sebetulnya upaya yang sekaligus hendak membuktikan bahwa pada dasarnya unsur moralitas

¹ Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 136.

seperti yang dikandung dalam tradisi keagamaan (*Islam*), sesungguhnya memiliki peran dan tempat di dalamnya.

Kerangka Teoretik

1. Kopernikanisme

Revolusi Kopernikan yang menandai perubahan pendulum paradigma tentang ilmu pengetahuan. Meski cara pandang tersebut cenderung menindakkanjuti geliat curiositas pencarian jawaban asal-usul alam yang berabad-abad sebelumnya telah diperbincangkan oleh Thales di era Yunani Kuno, namun dampak-dampak yang dihasilkannya melahirkan keprihatinan, kecemasan hingga penolakan. Nicolaus Copernicus (1473 – 1543), Johannes Kepler (1571 – 1626) dan Galilei Galileo (1546 – 1642) adalah tiga pemikir yang tercatat sebagai penganjur perubahan radikal tentang apa yang selama ini dipahami oleh publik selama ribuan tahun. Ketiganya merintis dan mengembangkan sebetulnya pembangkangan ilmiah tentang apa yang diyakini bahwa bumi sebagai pusat alam semesta, dan manusia sebagai gambaran sentral ciptaan manusia.²

Geosentris ke heliosentrisisme melahirkan paradigma baru tentang bumi yang tidak lagi menjadi pusat. Bumi hanya lah salah satu dari kumpulan planet yang mengelilingi bintang kecil di ujung galaksi: matahari. Sejak era Yunani Kuno, bumi menjadi pusat perhatian. Dalam perkembangannya, fenomena alam semesta tidak semata diterima begitu saja tanpa rasa ingin tahu (*curiositas*). Tak ada suatu hal yang pasti dari awalnya, tanpa diawali kenisbian.³

Kenisbian harus dibuktikan secara empiris. Filsafat menyajikan kehendak untuk berkembang, sementara secara praktis, pola kerja ilmu pengetahuanlah merupakan instrumennya. Penalaran yang kritis, reflektif, dan integral mencirikan pengetahuan sebagai sesuatu yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, memerlukan kerja nalar dan rasio dan tidak sekedar bersumber pada tradisi dan keyakinan sebagai warisan masa lalu. Hal itu yang bisa dianalisa dari pengertian umum pengetahuan (*scientia*), sebagai *refers to any systematic knowledge or practice*, diperoleh dari hasil penalaran dan metode yang sistematis.⁴

2. Ilmu Pengetahuan

Hakikat kerja ilmu pengetahuan lebih berkehendak untuk mencapai kemajuan, tanpa memperhatikan aspek-aspek di luarnya. Apa yang dilakukannya benar-benar terkait dengan deskripsi tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dengan menjelaskan gejala-gejala, hubungan kausalitas antara masing-masing fenomena (eksplanasi) sehingga melahirkan prediksi melalui data-data obyektif yang muncul. Dari cara kerjanya, ilmu pengetahuan bertujuan pada dirinya sendiri, bukan efek yang ditimbulkannya. Kriteria kebenaran yang dihasilkan sejauh hubungan gejala-gejala obyektif bisa dibaca secara verifikatif, sistematis dan obyektif atau bebas nilai.

² Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban: Sains, masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997), 53

³ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 59.

⁴ C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, 60

Objektivitas ilmu berelasi dengan fakta, bukan kepentingan kemanusiaan atau kepentingan di luar ilmu pengetahuan itu sendiri.⁵ Menurut David Resnik, apa yang disebut sebagai metode objektif tersebut bertujuan untuk mengukur akurasi kebenaran ilmu pengetahuan dan menghindari kesalahan-kesalahan ilmiah. Meski demikian, menurut Resnik, apa yang disebut sebagai metode tersebut telah mengalami pergeseran makna dari pemikiran Yunani sebelumnya, seperti pada Plato dan Aristoteles, yang menekankan pada aspek kontemplasi, observasi, deduksi dan induksi dalam memperoleh kebenaran. Bahkan menurut Plato, kebenaran ilmu pengetahuan diukur dari proses kontemplasi keabadian dan aspek-aspek non-fisik.⁶ Objektivitas yang kemudian berkembang pada zaman modern lebih mengarah pada proses ilmiah dalam kebenaran-kebenaran ilmu alam. Didukung oleh semangat positivisme, keabsahan ilmiah tidak lagi mengandalkan dimensi-dimensi lain selain dari karakteristik berpikir ilmu alam yang empirik dan verifikatif. Pergeseran paradigma Yunani dan Abad Pertengahan yang masih menentang pertimbangan lain selain keabsahan ilmiah ilmu alam, memunculkan karakter filosofis dan ilmiah yang senantiasa diawali dengan sikap skeptis, logis, ketelitian dan keakuratan dalam melakukan observasi. Tentu saja dalam konteks ini, pandangan tentang etika tidak memiliki tempat untuk berkembang.

Dimensi objektif inilah yang menunjukkan bahwa ilmu bekerja untuk ilmu. Nilai-nilai atau norma yang mengitarinya tidak menjadi bahan pertimbangan. Dari objek material dan formalnya pun, ilmu pengetahuan hanya bertujuan untuk menyatukan prinsip keilmuan demi untuk memperoleh perkembangan dan kemajuan. Prinsip bebas nilai inilah yang selalu mengandung persoalan tersendiri pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dimensi filosofis yang memberikan daya kemajuan bagi ilmu pengetahuan terkadang mengalami pergeseran makna dari makna yang sesungguhnya. *Epistemologi* yang dipahami para pemikir Yunani sebetulnya telah memagari perkembangan ilmu pengetahuan pada hal yang semata positif sebagai makna utama dari sebuah kemajuan. Hal itulah, misalnya, yang dikandung oleh prinsip tanpa pamrih, universal, objektif (tidak terdistorsi oleh kepentingan subjektivitas subjek), dapat dikomunikasikan serta progresif dalam membuka wilayah baru dan merevisi wilayah yang sudah digarap.

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, meski bebas nilai, selalu mengandung kontrol pada dirinya sendiri untuk menghindari penyimpangan tujuan utamanya. Karena itulah, menurut Jujun Sumantri dan van Peursen, pengertian bebas nilai ilmu pengetahuan sangat bergantung pada proses langkah-langkah keilmuan yang bersangkutan, bukan pada proses keilmuan secara keseluruhan. Jika dipandang dari sudut pandang bebas nilai, di mana ilmu pengetahuan bersifat otonom dan tidak bergantung pada nilai-nilai di luarnya, maka tentu saja hal ini mengesampingkan prinsip universal dan objektivitas yang lepas dari distorsi subjek.

Jürgen Habermas dan tokoh awal Mazhab Frankfurt, Max Horkheimer, tidak percaya pada prinsip bebas nilai yang dikandung ilmu pengetahuan. Bagi Habermas, kepentinganlah yang menentukan segala sesuatu yang akan dihasilkan sebagai sebuah keputusan. Kepentingan memiliki fungsi ideologis seperti “kepentingan

⁵ David B. Resnik, *The Ethics of Science* (London: Routledge, 1998), 49.

⁶ David B. Resnik, *The Ethics of Science*, 50.

teknis”, kepentingan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atau mempertahankan *status quo* sosial., sebaliknya, kepentingan emansipatoris justru berupaya untuk mendobrak dan menghancurkan *status quo* itu.⁷ Untuk membebaskan diri individu (subjek) dari berbagai kepentingan, maka diperlukan kondisi dialogis (intersubjektif) terus-menerus, yang bebas dominasi. Lewat teori kritis Mazhab Frankfurt, Horkheimer menganggap bahwa kemajuan ilmu pengetahuan mengandung nilai-nilai ideologis dibaliknya. Implikasi dan gagasan yang tersembunyi di bawah ilmu pengetahuan mendistorsi tujuannya utamanya. Rasio yang menjadi tameng utama ilmu pengetahuan seharusnya tidak sekedar rasio instrumental, di mana ilmu pengetahuan menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu. Karenanya, rasio atau kesadaran manusia bukan lagi berada pada taraf rasio instrumental, yang dipakai untuk meloloskan kepentingan atau tujuan tertentu, namun beralih kepada rasio komunikatif, di mana rasio senantiasa menguji dirinya dalam suasana dialogis.

Untuk menghadapi teori tradisional tersebut, Horkheimer dan Habermas menuntut untuk dikembangkannya sebuah teori kritis. Kritis berarti sadar akan pengandaian-pengandaian sosial teori-teori. Bagi Habermas, teori kritis merefleksikan hubungan perkembangan (*entstehungszusammenhang*) teori dengan penggunaannya (*verwendungszusammenhang*). Teori kritis ini selalu menyerang kepositifan teori-teori. Ia menyerang otonomi dan objektivitas pada klaim pendekatan teoritis. Teori kritis yang dikembangkan Horkheimer dan Habermas bersumber pada keprihatinan atas dialektika pencerahan yang dimunculkan era modernitas. Modernitas yang memunculkan sisi patologis dalam kehidupan manusia menyebabkannya tidak memberikan efek pembebasan pada manusia. Hal itu tampak dalam kehidupan kultural dan fenomena keseharian.⁸ Teori kritis menyadarkan teori akan pengandaian-pengandaian serta implikasinya yang tersembunyi. Teori ini selalu menghadapi teori dan ideologi yang muncul darinya pada klaim-klaimnya sendiri sehingga terkuaklah kebohongan dan kepalsuannya. Kepraksisan dan ke-emansipatoris-an teori kritis ini merupakan usaha yang teoritis. Membuka kepentingan-kepentingan terselubung sebuah teori dan menelanjangi teori-teori positif akan menghilangkan penampakan realitas yang tidak bersahabat sebagai realitas yang objektif.

Secara kategoris, Habermas melukiskan ketidakbebasan nilai ilmu pengetahuan sebagai berikut⁹:

⁷ Akhyar Y. Lubis, “Antropologi Kepentingan dan Konstruksi Metodologi Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Teori Kritis”, *Diktat Mata Kuliah Metodologi Filsafat Ilmu Pengetahuan Budaya*, 14 Oktober 2004, 46.

⁸ Peter Dews (ed.), *Habermas: Autonomy and Solidarity* (Cambridge: The Thetford Press, 1986), 96-97.

⁹ Jurgen Habermas, *Toward a Rational Society* (London: Heineman, 1971), 100-110.

93 | *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 22, No. 01, Juni 2022: 89-103.

KELOMPOK ILMU	TUJUAN DAN KEPENTINGAN
Ilmu-ilmu empiris analitis: Ilmu-ilmu alam	Tujuan: Mencari hukum alam yang pasti Kepentingan: Penguasaan alam (kepentingan kontrol teknis)
Ilmu-ilmu historis hermeneutika: ilmu sastra – sejarah	Tujuan: Pengungkapan makna Kepentingan: Perluasan subyektivitas dan komunikasi intersubjektif
Ilmu-ilmu tindakan (politik – sosial – filsafat – kritik ideologi)	Tujuan: Kehidupan manusiawi yang lebih baik Kepentingan: Emansipasi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik (*descriptive research*)¹⁰, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan data, fakta, dan kecenderungan yang terjadi, yang kemudian dianalisis dan direkomendasikan mengenai apa yang harus dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Dari segi objek, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹¹ Di tinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *eksploratif*¹² sebagai upaya untuk menemukan secara faktual, akurat dan sistematis terhadap fakta dan data tentang konsep ilmu dan etika dan relevansinya dengan persoalan kekinian, khususnya relevansi ilmu dengan etika dalam menciptakan tatanan pengetahuan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pendekatan analisis wacana (*discourse analysis*) juga digunakan sebagai cara mendekati teks-teks al-Qur'an secara kontekstual. Dalam konteks ini, al-Qur'an tidak sekedar didekati secara tekstual, tapi lebih dari itu, dimaknai secara kontekstual dengan merujuk pada nilai-nilai yang dikandungnya yang bersifat universal. Dengan demikian, relevansi ilmu pengetahuan dan etika dan menemukan titik temu yang saling mendukung tujuan masing-masing.

¹⁰ *Descriptive research* yakni memusatkan pada gambaran yang akurat dari karakteristik suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta dan karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Jadi penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan sesuatu (fenomena atau kejadian) dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, setelah suatu fenomena dideskripsikan, maka jenis penelitian lainnya (korelasional, diferensial, dan kausal) dapat dilakukan. Burke Johnson dan Larry Christensen, *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (Boston: Pearson Education, 2004), 437.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 18. Bahan dan sumber tertulis yang digunakan adalah penelitian yaitu buku, ensiklopedia, jurnal, tesis dan dokumen lainnya yang sesuai dengan prinsip kemutakhiran (*recency*) dan prinsip relevansi (*relevance*). Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hal.125

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 66-74.

Perspektif al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, perolehan pengetahuan memiliki logika tersendiri. Beberapa pemikir mengetengahkan perolehan pengetahuan perspektif al-Quran dengan 3 (tiga) cara. *Pertama, ilm.* Ilmu ada dua macam yaitu pertama pengetahuan teoritis (*naẓari*), yaitu pengetahuan tentang sesuatu misalnya pengetahuan tentang adanya alam. *Kedua*, pengetahuan praksis (*tajribi*), yaitu pengetahuan itu tidak sempurna kecuali setelah mengaplikasikannya, misalnya pengetahuan tentang ibadah.¹³ Di samping makna tersebut kata ilmu dari sisi lain ada dua macam ilmu yaitu ilmu samāi (wahyu) atau naqli, yakni ilmu pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Allah seperti wahyu dan ilham.

Kedua, hikmah. Hikmah bermakna “kokoh, mengikat”, memperoleh suatu kebenaran dengan ilmu dan akal. Al Hikmah dari sisi Allah sebagai Al-Ḥakim artinya Allah mengetahui segala sesuatu dan menciptakannya dengan sangat kokoh, sedangkan dari sisi manusia hikmah artinya “manusia mengetahui segala yang maujud dan dapat melakukannya kebajikan”. *Ketiga, ma'rifat.* Menurut para filsuf, ma'rifat adalah hasil dari interaksi hubungan antara zat yang dima'rifati dengan dengan obyeknya, berbeda dengan ilmu sekiranya ma'rifat terjadi pada satu waktu adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Ilmu pengetahuan dengan ma'rifat adalah ilmu pengetahuan tanpa perantara antara zat dan obyeknya seperti ilham atau 'irfān (pengetahuan yang langsung dari Allah).¹⁴ Ketiga macam peroleh ini tentu memiliki dasar yang berbeda dengan metode pencarian pengetahuan barat. Meski demikian, bukan kita memakai yang satu dan meninggalkan lain, demikian pula sebaliknya.

Perdebatan inilah yang secara moderat diulas oleh Quraish Shihab dengan merujuk pada pemikiran Muhammad Rasyid Ridha. Terdapat 3 (tiga) kategori pendekatan terhadap al-Qur'an, *pertama*, mereka yang menjadikannya sebagai sumber ajaran Islam; *kedua*; mereka yang mendekatinya dengan dimensi-dimensi *i'jaz* yang dikandungnya; *ketiga*, mereka yang mendekatinya dengan sebagai disiplin ilmu untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilandasi ayat-ayat al-Qur'an.¹⁵

Ketiganya harus didekati secara utuh, tanpa meninggalkan satu sama lain. Ridha mengilustrasikan bahwa saya tidak mengetahui seseorang dapat manafsirkan firman Allah “manusia adalah umat yang satu”, maka Allah mengutus kepada mereka para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan... (QS. 2:123), sedang dia tidak mengetahui keadaan umat manusia (sejarah umat manusia dan sosiologi).¹⁶ Demikian juga ayat-ayat yang terkait dengan astronomi, embriologi dan ekonomi.

Perspektif Etika

Pertautan antara ilmu pengetahuan dengan etika tidak bisa diabaikan, mengingat dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan tidak hanya berdampak tunggal. Secara khusus, ia terkait dengan berbagai realitas di luarnya, termasuk efeknya bagi kemanusiaan sebagai sesuatu efek universal yang hendak juga dituju oleh ilmu pengetahuan. Universalitas efek tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya

¹³ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Ghazālī, tth), 355.

¹⁴ Jamil Ṣalibā, *Mu'jam al-Falsafī* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1979), 186.

¹⁵ Quraish Shihab, *Posisi Sentral Al-Qur'an dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 167-168.

¹⁶ Quraish Shihab, *Posisi Sentral Al-Qur'an dalam Studi Islam*, 167-168.

pemikiran positivistik yang berupaya mengarahkan dimensi kerja ilmu pengetahuan sebagai sekedar berelasi secara internal pada dirinya sendiri, rawan terdistorsi pada kepentingan yang tidak lagi objektif.

Objektivitas yang hanya diukur sejauh pengetahuan bekerja secara empirik, verifikasi dilandasi oleh metode kritis, sistematis dan reflektif tidak sepenuhnya berbuah manis bagi peradaban. Oleh karena itu, etika merupakan ranah percaturan pemikiran yang tidak bisa diabaikan. Tentu saja, bukan untuk menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, namun lebih mengarahkan kerjanya agar tidak menyimpang dari tujuan sejatinya. Tujuan etika adalah membatasi agar tidak terjadi deviasi nilai dalam sistem dan menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Memang jika dianalisa dari perspektif acuan berpijaknya, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang berbeda dengan etika. Etika yang berasal dari kata *ethos*, yang berarti tempat tinggal yang biasa, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan dan cara berpikir. Secara etimologis diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan,¹⁷ memiliki landasan tertentu yang bersifat tetap dengan sistem yang telah ada. Dimensi kemajuan dan perkembangan boleh jadi merupakan pengecualian tersendiri dalam etika, berbeda dengan ilmu pengetahuan. Etika merupakan norma yang seharusnya memayungi kerja ilmu pengetahuan, sistem nilai, kode etik, dan moralitas yang memandu perjalanannya.

Hal ini menunjukkan bahwa kaitan ilmu pengetahuan dengan etika tidak sepenuhnya berlaku sebagai sebuah pencapaian ilmu, namun juga menakar perjalanan efeknya sesuai dengan perilaku ilmuwan. Sebab etika sendiri merupakan ilmu yang reflektif dan kritis tentang tema-tema yang menyangkut perilaku. Wujud perilaku tersebut akan dinilai secara filosofis meliputi pola hidup yang baik, menjadi orang baik dan menginginkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Jika ilmu pengetahuan terkait dengan “apa yang ada” (*das sein*), maka etika terkait dengan “apa yang seharusnya ada” (*das sollen*). Hal itulah yang tergambar dalam tiga pendekatan yang dilakukan oleh etika, yakni etika deskriptif, normatif dan metaetika.

Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Etika normatif tidak hanya melukiskan tapi memberi penilaian atas dasar norma-norma, karena itu ia juga bersifat preskriptif dengan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral dengan argumentasi-argumentasi memberikan alasan-alasan mengapa suatu tingkah laku harus disebut baik atau buruk. Serta Metaetika yang bergerak pada taraf lebih tinggi, yakni bahasa etis atau bahasa yang kita pergunakan di bidang moral, yang menganalisa logika-logika khusus dari ucapan-ucapan etis.

Secara umum, persoalan etika memiliki landasan universal dan cenderung transendental. Ia memiliki klaim-klaim tertentu yang bersifat sebagai pedoman, tanpa harus terlebih dahulu menentukan praksis seperti apa yang akan dibatasi dan diarahkannya. Immanuel Kant mengkategorikan hal ini dalam diskursus Rasio Murni (*Pure Reason*). Kant menegaskan bahwa tidak selamanya keputusan atau kebenaran diperoleh secara *a posteriori*, melainkan juga secara *a priori* atau bersumber pada

¹⁷ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 4-7.

kesadaran murni rasio. Berdasarkan rasio murni itulah, Kant kemudian melangkah ke persoalan rasio praktis (*Critic of Practical Reason*).¹⁸ Dalam rasio murni, keputusan etis lebih bersifat *a priori*. Perbuatan yang bisa dinilai secara etis tidak harus mempertimbangkan sesuatu yang berada di luar tindakan tersebut, atau menyangkut kenyataan yang ada, melainkan bersumber pada kenyataan yang seharusnya ada. Penilaian ini tidak bersifat empiris, melainkan menyangkut asas-asas tindakan (*a priori*). Karena itu, etika adalah kajian moral yang bersifat imanen dan memakai asas transendental.

Etika pada dasarnya tidak sekedar membatasi dan membuat ilmu pengetahuan terkesan terhambat, melainkan mengandung nilai kehendak atau kebebasan bagi manusia untuk bertindak. Para ilmuwan bisa saja melandasi pencarian keilmuawannya sebagai wujud kebebasan, namun kebebasan yang dimaksud bersumber pada dirinya sendiri (*das ding an sich*), bukan pada yang lain. sebab boleh jadi kebebasan tersebut atas tujuan atau kepentingan yang lain (*object causation*). Kebebasan bisa berlaku demikian sebab disandingkan dengan asumsi-asumsi lainnya seperti hati nurani, nilai dan norma, hak dan kewajiban serta keutamaan. Hati nurani membimbing individu untuk menghayati baik dan buruk pada konkrit tindakannya. Asumsi tentang hati nurani menyadari sepenuhnya bahwa individu memiliki kesadaran, berefleksi dan mengenal dirinya sendiri. Hati nurani membimbing individu, bukan saja melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat moral, namun juga turut mengetahui perbuatan-perbuatan tersebut.

Pada aspek kebebasan, individu mampu mengangkat nilai-nilai eksistensialnya dengan bertindak sesuai dengan kesadarannya. Kebebasan inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia bertindak atas dasar kesadaran bahwa tindakan tersebut memiliki efek pada dirinya, sementara binatang bertindak berdasarkan insting naluriah tanpa mengetahui bahwa hakikat tindakan tersebut. Aspek kebebasan seringkali memiliki konotasi negatif jika tidak difungsikan sesuai dengan perannya. Menurut John Stuart Mill, kebebasan pada dasarnya tidak sekedar bermakna positif, di mana subjek bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Namun kebebasan juga bermakna negatif, di mana setiap individu bebas dari ancaman orang lain. Atas dasar itulah kebebasan mengandung makna tanggung jawab. Tanggung jawab hadir ketika kebebasan tersebut dikomunikasikan dengan kebebasan orang lain dalam ranah sosial.

Pada aspek nilai dan norma, etika bisa diukur sejauh ia dipraktikkan dalam tingkah laku. Nilai dan norma akan berlaku saat perilaku tersebut tidak hanya bersifat teoritis, namun praktis. Dalam konteks inilah etika memiliki keterkaitan erat dengan nilai, sebab ia mengaitkan perbuatan dengan sebutan baik atau buruk. Oleh karena itu pula, nilai dan norma itu sendiri tidak berdiri sendiri. Meski demikian, ia ada mendahului perilaku itu sendiri. Nilai dan moral merupakan sandangan bagi sebuah perbuatan, saat perilaku tersebut dipraktikkan. Ia bisa saja bersumber dari tradisi, adat, budaya atau agama. Hal ini sekaligus menepis anggapan umum tentang paham relativisme, di mana segala perbuatan terkesan relatif, tak memiliki nilai dan norma tertentu.

¹⁸ Friedrich, Carl J., (ed.), *The Philosophy of Kant: Immanuel Kant's Moral and Political Writings* (New York: The Modern Library, 1949), 13-14.

Asumsi tentang etika juga didukung oleh hak dan kewajiban. Seperti halnya kebebasan, hak terbagi atas hak positif dan hak negatif. Hak positif terkait dengan hak untuk melakukan sesuatu, sementara hak negatif terkait dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang dipandang tidak bisa diterima secara etis oleh orang lain. Hak ini juga menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas. Meski demikian, hak tersebut selalu mendapati kenyataan untuk bertentangan dengan hak orang lain. Hak tersebut bisa bersifat legal, sebagai sesuatu yang memiliki ketetapan undang-undang atau sistem. Sementara hak yang bersifat moral lebih merupakan hak yang dilandasi atas prinsip-prinsip etika.

Dalam dimensi hak senantiasa disertai dengan kewajiban. Ketika seseorang memiliki hak untuk bertindak, maka saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Korelasi antara hak dan kewajiban pada ujungnya menghendaki adanya keadilan satu sama lain. Keadilan yang hanya bisa diterima sebagai bentuk penerimaan orang lain atas hak tersebut. Pada aspek keutamaan, etika tidak sekedar dipandang dari sudut perilaku, namun lebih kepada figur individu. Keutamaan terkait dengan seharusnya seperti apa individu itu. Etika seperti inilah yang sebetulnya lebih ditekankan para pemikir dan filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Tujuan utama dalam kehidupan adalah mencari keutamaan. Universalisme etika lebih tampak dalam etika keutamaan, sebab apa yang disebut sebagai baik atau buruk tidak sekedar mewujudkan pada perilaku, namun terlebih pada figur pelaku atau manusia. Jika individu meraih puncak keutamaan, maka secara otomatis perilakunya akan tertuntun dengan baik. Meski demikian, menurut Bertens, etika keutamaan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diikuti oleh etika kewajiban sebagai wujud praktis dari figur individu yang mencapai taraf keutamaan. Keutamaan itulah yang melahirkan disposisi atau kecenderungan, kehendak, kebiasaan dan keterampilan untuk berbuat baik.

Menakar Solusi

Cara pandang ilmu pengetahuan yang memiliki metode keabsahannya tersendiri lepas dari dimensi etis melahirkan imbas yang tidak sedikit bagia kemanusiaan. Metode ilmiah yang lebih bersifat positivistik lebih menampakkan ilmu pengetahuan yang buta akan realitas di luar dirinya sendiri. Asumsi kebebasan dan tanggung jawab seharusnya berjalan beriringan dan dipandang sebagai poin utama dalam mengokohkan eksistensi manusia, bukan membatasinya. Keterkaitan etika dengan ilmu pengetahuan bertujuan untuk meminimalisir imbas dan dampak negatif ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukanlah wacana yang berdiri sendiri dan bekerja untuk kepentingan ilmu, namun terlibat dalam kehidupan yang beraneka warna. Efek yang variatif itulah yang menegaskan bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, namun senantiasa melibatkan nilai-nilai lain yang, boleh jadi, bertentangan dengan tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di sinilah letak ambivalensi dari tujuan tersebut, sebab disamping tujuan mulia untuk menyejahterakan kehidupan umat manusia, namun efek negatif selalu juga hadir.

Pada konteks ini pula dibutuhkan kesadaran etis, mulai dari tahap penentuan kebenaran hingga tahap hasil dalam bentuk penerapannya. Sebab pada dasarnya kebenaran yang diperoleh tidak sekedar mewarnai jalan pikiran ilmuwan, namun juga jalan hidupnya sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, Kant mengaitkan etika

sebagai sesuatu asumsi pemikiran yang bersifat universal, tidak sekedar bersandar pada moralitas yang terkotak-kotak dalam perpektif tradisi, budaya, norma atau agama, melainkan pada dimensi universal kemanusiaan.

Resnik memandang bahwa ambivalensi cara pandang ilmiah disebabkan karena ilmu pengetahuan sekedar dipandang sebagai sebuah profesi, karenanya bersifat profesional. Profesionalisme mengarahkan asumsi tentang kebenaran ilmu pengetahuan yang sepenuhnya absah saat metode yang dipakainya terpenuhi. Karena itu ia mengajukan beberapa pertimbangan khusus untuk menampatkan kaitan etika dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pertimbangan tersebut adalah kejujuran, kehati-hatian, keterbukaan, kebebasan, tanggung jawab sosial, legalitas, kesalingpahaman, efisiensi dan penghormatan tertinggi pada subjek.¹⁹ Kejujuran menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya memangandung pemalsuan dan misrepresentasi data, sehingga akurasi yang dihasilkan lebih terpercaya dan tidak sekedar memenuhi panggilan kepentingan sang ilmuwan belaka. Aspek kehati-hatian menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan harus memahamin posisinya dalam berbagai kepentingan, tidak sekedar hadir melalui objektivitas metodologis, namun juga memahami kondisinya sebagai sesuatu yang rentan pada konflik kepentingan. Keterbukaan dan kebebasan menunjukkan bahwa berbagai penemuan ilmiah dan kebenaran yang dihasilkannya seharusnya menerima segala bentuk kritikan dari luar dirinya, sebab tidak selamanya kebenaran dicapai sebagai hasil produk pada dirinya sendiri. Hal ini menambah daya akurasi pada setiap perolehan kebenaran.

Tanggung jawab merupakan wujud kesadaran etis utama yang menegaskan posisin ilmu pengetahuan yang seharusnya memperhatikan lingkungan sekitarnya`. Tanggung jawab sosial ini pula yang mengaskan bahwa ilmu pengetahuan menerima legitimasi publik sebagai kebenaran ilmiah. Aspek legalitas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya mematuhi peraturan atau norma tertulis dalam melakukan aktivitas ilmiah. Aspek kesalingpahaman menunjukkan bahwa berbagai tipikal kebenaran seharusnya memayungi aktivitas ilmiah. Tidak pada tempatnya egoisme ilmiah menjadi pijakan dalam bertindak yang mengabaikan kritik dan pandangan lain yang berbeda-beda. Aspek efisiensi menunjukkan keharusan ilmu pengetahuan untuk berikap efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber yang bisa mengembangkan aktivitasnya. Sementara aspek penghargaan atas subjek menunjukkan bahwa ekperimentasi yang menjadi aktivitas rutin dalam pencarian kebenaran ilmiah seharusnya tidak memakai subjek manusia atau makhluk hidup sebagai tumbal. Hal ini terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh subjek sebagaimana yang telah ditegaskan dalam persoalan moral.

Menjadikan etika sebagai teropong kemanusiaan pada dasarnya menempatkan sebagai payung yang selaras dengan eksistensi kemanusiaan. Hal ini hanya bisa terjadi jika etika dimaknai secara reflektif-filosofis, sebagai nilai yang sejalan dengan kemanusiaan itu sendiri. Bukan nilai yang tercipta atas dasar pemaknaan lokalistik yang melahirkan kebenaran. Atas dasar itulah, etika memiliki padanan pemaknaan tentang *good (baik)* dan *evil (jahat)*. Segala yang baik sejatinya universal yang dipahami secara bersama-sama, seluruh umat manusia. Sementara yang jahat pun memiliki pemahaman bersama yang tidak berbeda. Pada gilirannya, persoalan etika adalah persoalan tentang

¹⁹ David B. Resnik, *The Ethics of Science*, 53-68.

kemanusiaan, terlepas dari perbedaan agama, ras, budaya, tradisi dan lain sebagainya.²⁰ Pemaknaan bersama itu tidak lahir dengan sendirinya. Atau tidak hadir sebagai sebuah konvensi yang memungkinkannya untuk berubah. Pemaknaan bersama itu lahir dari kemurnian akal budi (rasionalitas) yang dimiliki oleh manusia. Perbedaan pemaknaan tentang perilaku yang dianggap memenuhi unsur etika atau tidak memenuhi unsur etika hanya terletak pada sejauhmana rasionalitas akal budi tersebut dipergunakan. Sebab itulah sejak awal, Plato mempertautkan perilaku etis sebagai kemampuan manusia menghadirkan dunia ide, dunia yang ideal, bukan dunia rekaan atau ciptaan untuk kepentingan tertentu.²¹

Atas dasar itu, pemaknaan tentang etika yang dihubungkan dengan agama atau ajaran tertentu memiliki persoalan tersendiri. Sebab ajaran atau tradisi mengandung lokalitasnya tersendiri. Pesan-pesan keberagamaan yang mengeksklusifikasi putusan-putusan etis dan membuatnya “melanggar etika” atau “sesuai dengan etika”, sesungguhnya memiliki paradoks tersendiri dalam rumusan etika sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Solusi Qur’anic

Pesan qur’anic sebagaimana halnya etika merupakan pedoman dan petunjuk dalam mencandra berbagai persoalan dan dinamika kehidupan. Etika ditempatkan sebagai metode berpikir dalam memahami al-Qur’an sebagai kitab suci yang bersentuhan langsung dengan pembacanya. Atas dasar itulah, Mukti Ali pernah menggaungkan tentang metode sintesis yang mempertemukan pendekatan kajian kesialam dengan kajian-kajian sosial dalam memahami al-Qur’an. Mendekati al-Qur’an hanya dengan al-Qur’an tidak cukup mampu menjawab persoalan dan mengakibatkan lemahnya analisa tentang konstektualisasi persoalan umat. Sebagaimana sebaliknya, mendekati al-Qur’an hanya dengan instrumen ilmu pengetahuan juga tidak akan memberikan hasil yang secara utuh meneropong persoalan sesuai dengan maksud kitab suci.²² Karena itu, al-Qur’an pun pada dasarnya bisa didekati dengan 3 (tiga) metode pendekatan filosofis demi aktualisasi pesan-pesan yang dikandungnya. Ketiga metode tersebut adalah *pertama*, dimensi epistemologis, yakni kajian filsafat dari aspek bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini juga disebut teori ilmu pengetahuan, yaitu metodologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar; *kedua*, dimensi ontologis, yakni cabang filsafat yang membahas tentang objek kajian ilmu pengetahuan, atau hakikat segala yang menjadi kajian ilmu; dan ketiga, dimensi aksiologi, yakni cabang filsafat yang membahas tentang tujuan dan nilai guna serta nilai manfaat ilmu pengetahuan.

Keterkaitan ilmu pengetahuan dan etika dalam rumusan qur’anic sejatinya memperoleh porsi yang lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Etika dan pesan etis quranik tidak berpretensi untuk menghambat kemajuan ilmu namun mengokohkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bebas sekaligus bertanggung jawab. Tujuan mulia ilmu pengetahuan untuk menyejahterakan umat manusia tidak seharusnya terdisoroti oleh kepentingan pragmatis ilmu dengan mengabaikan dimensi

²⁰ R. C. Lodge, *Plato’s Theory of Ethics: The Moral Criterion and the Highest Good* (New York: Harcourt, 1928), 343-345.

²¹ R. C. Lodge, *Plato’s Theory of Ethics: The Moral Criterion and the Highest Good*, 345.

²² A. Mukti Ali, *Metodologi Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, 54-55

etika yang seharusnya memayungi aktivitasnya. Asumsi ilmiah pada dasarnya tidaklah difungsikan dengan hanya memakai kaca mata kuda belaka. Ilmu pengetahuan memiliki efek tidak hanya untuk kepentingan ilmu namun turut mewarnai kehidupan umat manusia. Jika kemajuan berkembang sebagai sebuah hasil ilmiah, maka tentu saja tidak menurunkan harkat dan martabat kehidupan manusia dan juga alam semesta. Pada titik inilah asumsi etis quranik tidak bisa diabaikan. Etika merupakan pedoman bagi aktivitas ilmiah, menuntun individu agar bertindak lebih bijak dan meraih keutamaan hidupnya sebagai tujuan universal etika.

Sementara itu, di sisi lain, berbagai disiplin ilmu menjadi penting untuk digunakan sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an, sehingga pada titik tertentu tidak relevan lagi untuk membandingkan al-Qur'an dengan kajian-kajian keilmuan lainnya. Pesan-pesan universal tidak terlepas dari tujuan agama itu sendiri. Sebagai pedoman dan petunjuk hidup, hukum yang bersumber dari al-Qur'an memberi jalan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat manusia. Tujuan utamanya adalah agar kehidupan umat manusia berlangsung dengan baik, menghasilkan kemaslahatan dan menghindari mudharat, sehingga tercapai keselamatan dunia dan akhirat.²³

Aspek kemanusiaan merupakan tujuan penting dalam konstruksi maupun logika penggalian dan penetapan dimensi-dimensi etis. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konstruksi rasionalitas etis quranik merupakan konstruksi rasional sejauh ia dimaknai secara universal. Sementara itu, anasir lokalistik di dalamnya harus terus dikaji dan diperdebatkan agar melahirkan pendekatan-pendekatan yang lebih universal. Al-Syathibi menegaskan bahwa sebagus apapun syariat (*etiket*) akan menjadi tidak berarti tanpa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum-hukum yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan hamba (*'abd*).²⁴ Dalam Tafsir *Al-Manâr*, Muhammad Abduh menyampaikan hal menarik terkait peristiwa kolosal yang memperhadapkan manusia (Adam) dengan malaikat. Surah al-Baqarah/31 dengan jelas menyebutkan bahwa Adam memperoleh pengetahuan langsung dari Allah Swt. Seutas ayat yang sekaligus menyiratkan muasal pengetahuan manusia ditegaskan sebagai suatu hal yang mencirikan bagaimana sesungguhnya pengetahuan diperoleh oleh manusia. Allah yang mengajarkan berbagai nama secara menyeluruh. Dialah pemilik pengetahuan sesungguhnya. Tidak ada pengetahuan bagi siapa pun, kecuali apa yang Dia ajarkan. Karena itu, Allah disebut Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kebijakan mengiringi pengetahuan. Tanpanya, pengetahuan menjadi rapuh dan kehilangan relevansi etika.

Abduh menegaskan, bahwa ayat tersebut semakin menegaskan fungsi kekhalifan manusia. Pengetahuan (teori) dan pengamalan (praksis) dari pengetahuan dimiliki oleh malaikat secara terbatas. Sementara itu, pengetahuan manusia dan pengamalan atasnya tidaklah terbatas (*gair mahdûdîn*). Karena itulah manusia lebih pantas mengemban amanah sebagai khalifah.²⁵ Distingsi antara entitas ke-malaikat-an dengan ke-manusia-an hadir sejak awal penciptaan. Nilai-nilai instrinsik yang dimiliki manusia dijelaskan oleh Abduh sebagai sesuatu yang bisa memperoleh pengetahuan secara sekilas dan langsung, pun bisa memperolehnya secara gradual, melalui penalaran

²³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 3.

²⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, 42.

²⁵ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-qur'an Al-Karim (Tafsir Al-Manar)*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1947), 261-263.

akal yang dimilikinya.²⁶ Dari penjelasan itu, ayat tersebut sejatinya menegaskan bahwa pengetahuan apapun yang diperoleh oleh manusia membutuhkan relevansi agar kebenaran ilmiah tersebut menjadi payung bagi penarapannya dalam latar kehidupan umat manusia. Tidak ada batasan atas ilmu, sebab sejak awal memang batasan-batasan tersebut sudah ternafikan.

Kesimpulan

Argumentasi tentang rasionalitas etis qur'anik menjadi bagian dari pembentukan kebenaran itu sendiri. Sebab kebenaran adalah sebetuk pranata yang mengatur kehidupan umat manusia yang hidup dan berinteraksi dengan diri, orang lain serta lingkungannya. Tatanan interaksional itulah yang kemudian mencari pendasaran dalam kitab suci, dimana manusia senantiasa berdialog dengannya. Interaksi manusia dengan kitab suci tidak sekedar berada dalam tataran artifisial, tapi juga melibatkan berbagai dimensi yang dikandungnya, termasuk akal, pikiran, hati, perasaan dan penginderaan atas apa yang dialami dan dirasakannya. Dalam konteks yang lebih jauh lagi kita melihat bagaimana corak pemikiran etis tidak sepenuhnya mengabaikan dimensi ilahiyah ataupun metafisika. Meski Plato sebagai penganjur rasionalisme, namun pemikirannya tentang "dunia ide" mengandaikan adanya realitas di luar yang fisik yang telah hadir terlebih dahulu. Demikian juga filsuf semisal Martin Heidegger yang meskipun menyoal tentang "Ada", namun "ada' nya bukan sekedar manusia, benda atau pun binatang. "Ada" memiliki makna yang melampaui metafisika sekalipun.²⁷ Mungkin saja, kita bisa memaknai sebagai sesuatu yang berada di luar sana. Atau seperti halnya GW. Hegel yang memandang bahwa proses dialektika kehidupan mengarah pada Roh Absolut. Suatu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa kebanyakan dari pemikir tersebut begitu lama mengenyam pendidikan teologis sebelum menelorkan pemikiran-pemikirannya.

²⁶ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-qur'an Al-Karim (Tafsir Al-Manar)*, 263.

²⁷ F. Budi Hardiman, *Heidegger dan Mistik Keseharian* (Jakarta: Gramedia, 2016)
al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, Vol. 22, No. 01, Juni 2022: 89-103. | 102

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-qur'an Al-Karim (Tafsir Al-Manar)*, Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- Ali, A. Mukti, *Metodologi Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Ghazālī, tth.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban: Sains, masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997.
- Dews, Peter (ed.), *Habermas: Autonomy and Solidarity*, Cambridge: The Thetford Press, 1986.
- Friedrich, Carl J., (ed.), *The Philosophy of Kant: Immanuel Kant's Moral and Political Writings*, New York: The Modern Library, 1949.
- Habermas, Jurgen, *Toward a Rational Society*, London: Heineman, 1971.
- Hardiman, F. Budi, Heidegger dan Mistik Keseharian, Jakarta: Gramedia, 2016
- Lubis, Akhyar Y., "Antropologi Kepentingan dan Konstruksi Metodologi Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Teori Kritis", *Diktat Mata Kuliah Metodologi Filsafat Ilmu Pengetahuan Budaya*, 14 Oktober 2004.
- Lodge, R. C., *Plato's Theory of Ethics: The Moral Criterion and the Highest Good*, New York: Harcourt, 1928.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Religion and the Order of Nature*, Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Resnik, David B., *The Ethics of Science*, London: Routledge, 1998.
- Şalibā, Jamīl, *Mu'jam al-Falsafi*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1979.
- Shihab, Quraish, *Posisi Sentral Al-Qur'an dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Verhaak C., dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.